

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 24 Februari 2022 Rusia secara resmi menyatakan perang dengan Ukraina yang dinyatakan langsung oleh Presiden Vladimir Putin (CNBC Indonesia, 2022). Invasi yang dilakukan Rusia mengundang perhatian negara-negara barat salah satunya Inggris. Pemerintah Inggris mengutuk keras atas tindakan Rusia karena dampak yang dirasakan Inggris setelah terjadinya peristiwa tersebut. *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* mengungkapkan jumlah korban jiwa mencapai 7.110 warga sipil tewas atas tragedi perang di Ukraina (Catelyn, 2023). Hal ini menyebabkan peningkatan pengungsi mencapai 180.000 di Inggris (Nemesh, 2023). Inggris merespon hal ini dengan menerapkan kebijakan sanksi pemutusan kerjasama dengan Rusia.

Meskipun begitu, sanksi ini justru dikhawatirkan memperburuk keadaan ekonomi Inggris setelah Brexit dan anjloknya poundsterling. Inggris mengalami inflasi mencapai 9,1% pada Mei 2022. Hal ini menyebabkan perdagangan Inggris diproyeksikan tertinggal dari negara Perancis dan pertumbuhan ekonomi akan stabil bergantung dengan berakhirnya konflik Rusia dan Ukraina (Inman, 2022). Meskipun Inggris menghadapi krisis ekonomi, Inggris memberlakukan kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina sebagai bentuk solidaritas. Inggris berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 347 juta poundsterling sebagai pasokan medis dan kebutuhan lainnya kepada penduduk Ukraina dan

pengungsi di negara-negara tetangga hingga tahun 2025 secara bertahap (Loft, 2023). Kebijakan bantuan kemanusiaan Inggris pertama kali telah diberlakukan pada tanggal 27 Februari 2022 (UK Government, 2022).

Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat jurnal yang membahas tentang kebijakan Uni Eropa dalam memberikan bantuan militer kepada Ukraina di masa invasi Rusia. Uni Eropa menjatuhkan sanksi, menghentikan kerjasama dengan Rusia, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina sebesar 50 juta Euro hingga 500 juta Euro. Pendekatan konstruktivisme dari Petter J. Katzenstein dan Alexander Wendt. Katzenstein menjawab tiga kemungkinan kepentingan dari bantuan militer yang diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan Eropa, meningkatkan hubungan Uni Eropa secara ekonomi dan politik dan menjaga nilai dan norma demokrasi liberal di Ukraina (Umam, 2023).

Selain itu terdapat skripsi David Silitonga yang membahas kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bantuan luar negeri pada konflik Georgia Rusia tahun 2006-2011. Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi, politik dan militer kuat. Kepentingannya dapat dicapai dengan terlibat kerja sama atau konflik internasional. Amerika Serikat mendukung Georgia dari segi finansial, bantuan pelatihan militer, menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia, dan mendukung keikutsertaan dalam NATO. Bantuan luar negeri paling besar diberikan tahun 2008 sekitar USD 1 miliar sebagai keperluan perang dan perbaikan ekonomi Georgia pascaperang. Konsep bantuan luar negeri dan kepentingan nasional dari Morgenthau melihat bahwa bantuan yang diberikan menambah kekuatan politik bagi Amerika Serikat dari respon positif Georgia dan dunia internasional,

memperoleh kekuasaan melalui status quo dengan membuat Georgia tidak bergantung pada Rusia dan meningkatkan kerja sama ekonomi, militer, dan budaya (Silitonga, 2017).

Terakhir skripsi dari M. Najib yang membahas kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Rusia dan Ukraina menganalisis dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Beberapa hasil didapat yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan pertahanan yaitu mencegah adanya ancaman penggunaan senjata nuklir dan NSNW oleh Rusia dalam konflik tersebut. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat yaitu penjatuhan sanksi kepada Rusia dan mengurangi ketergantungan sekutu Eropa pada suplai energi. Kepentingan tatanan dunia yang hendak dicapai yaitu menjaga stabilitas Eropa dan sekutu NATO, mempertahankan tatanan liberalisme dan mencegah eskalasi konflik yang lebih jauh dan melemahkan kemampuan Rusia agar tidak dapat melakukan agresi di masa depan. Terakhir, kepentingan ideologi yang ingin dicapai dengan menyebarluaskan pembangunan sistem pemerintahan yang demokrasi (Najib, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah didapat rumusan masalah yang dapat diteliti yaitu “Bagaimana politik domestik mempengaruhi Inggris dalam implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi gelar Sarjana dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dalam penelitian selanjutnya.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian dilakukan memungkinkan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Inggris kepada Ukraina, memberikan ruang untuk menganalisis secara spesifik faktor politik domestik Inggris dalam implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan internasional interaksi sebuah negara dengan negara lain menjadi hal yang penting, di dalam prosesnya terdapat berbagai kebijakan luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan kepentingan nasional. Seperti studi kasus kebijakan bantuan kemanusiaan negara Inggris terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022 untuk mengetahui pengaruh politik domestik yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

1.4.1 Foreign Aid as Foreign Policy Tool

Kebijakan luar negeri merupakan strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi di dunia internasional (Goldstein, *International Relations*, 1999). Kebijakan luar negeri identik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan negara berupa ekonomi maupun ideologi dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Instrumen kebijakan luar negeri dapat berupa diplomasi, perjanjian kerjasama dan asosiasi, perdagangan, sanksi ekonomi, kekuatan militer, dan penggunaan bantuan luar negeri (Apodaca, 2017). Bantuan luar negeri merupakan salah satu alat implementasi kebijakan luar negeri. Menurut Apodaca bantuan luar negeri memberikan keuntungan bagi negara donor untuk memiliki akses dan pengaruh dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara penerima (Apodaca, 2017). Secara umum negara memiliki dua tujuan utama dalam interaksi dengan negara lain pada sistem internasional yaitu mempertahankan dan melindungi status quo atau mengubah status quo (Apodaca, 2017).

Sebagai alat kebijakan luar negeri, bantuan luar negeri diberikan kepada negara penerima donor sebagai imbalan atau bujuk rayu untuk mengubah perilaku dan secara fakta bantuan luar negeri tidak jauh dari kata pamrih (Apodaca, 2017). Bantuan luar negeri juga digunakan sebagai pelengkap intervensi, seperti studi dari Kisangani dan Pickering pada tahun 2015 memaparkan bahwa intervensi militer negara donor memiliki pengaruh terhadap alokasi bantuan luar negeri (Apodaca, 2017). Bantuan luar negeri merupakan alat untuk melengkapi penggunaan kekuatan militer dan memastikan bahwa tujuan kebijakan luar negeri tercapai dan akan

diamankan setelah tercapai. Bantuan asing "menunjukkan niat baik dari intervensi tersebut (terhadap penduduk target, jika bukan pemerintah target), dan bahwa aksi militer dilakukan untuk memajukan cita-cita yang dimiliki oleh komunitas internasional yang lebih luas" (Apodaca, 2017). Lancaster berpendapat bahwa pemberian bantuan luar negeri telah berkembang menjadi norma internasional dan bantuan luar negeri sering kali diberikan untuk kepentingan lain selain alasan pembangunan atau kemanusiaan (Apodaca, 2017). Negara-negara Barat tidak hanya ingin mengoptimalkan bantuan luar negeri karena tujuan ekonomi dan politik selain pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga untuk mempromosikan kepentingan geostrategis, hak untuk membangun dan mempertahankan pangkalan asing, memperkuat aliansi, atau mempertahankan rezim sekutu yang berkuasa (Apodaca, 2017).

Pada masa kontemporer hubungan internasional menunjukkan kekuatan dalam penguatan hubungan ekonomi multilateral. Negara-negara memiliki ketergantungan satu sama lain dari sumber daya dan komoditas yang memungkinkan mengembangkan infrastruktur ekonomi yang kuat (Bindra, 2018). Negara-negara donor bertindak sesuai dengan kepentingan yang dapat mencapai tujuan politik tertentu, tetapi dampak politik bantuan luar negeri terhadap negara penerima bisa bervariasi, terutama jika bantuan tersebut diimbangi oleh bantuan dari negara lain. Bantuan luar negeri memiliki keterkaitan dengan aspek budaya, ekonomi dan politik yang dijadikan alat kekuasaan atau ketergantungan saling berhubungan antara negara donor dan negara penerima (Bindra, 2018). Bantuan luar negeri dapat berupa hibah, kerja sama teknis, kredit, pinjaman, dan jaminan

pinjaman. Dalam hal penerima bantuan harus memiliki izin untuk menerima bantuan karena berhubungan dengan prinsip kedaulatan nasional dan sejarah kolonialisme (Bindra, 2018).

Kekuatan suatu negara terletak pada sumber daya alam yang dimiliki karena dapat menjadi alat politik dan pengaruh dalam diplomasi internasional. Ketergantungan negara berkembang pada ekspor sumber daya alam menjadikan hal yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Bantuan luar negeri negara maju dapat menjadi untuk memengaruhi negara negara berkembang (Bindra, 2018). Dua pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh negara berkembang yaitu untuk masuk pada salah satu blok kekuatan besar atau mengadopsi kebijakan non blok. Jika pilihan kebijakan non blok dapat memungkinkan suatu negara memperoleh bantuan dari dua blok yang dapat membantu meningkatkan hubungan ekonomi. Selain itu kebijakan non blok juga memberikan peran untuk lebih bebas dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan negaranya (Bindra, 2018).

1.4.2 Domestic Level Analysis

Menurut Goldstein tingkat analisis di dalam hubungan internasional dibagi menjadi empat tingkatan analisis, yaitu tingkat individu, tingkat domestik, tingkat antar negara dan tingkat global (Goldstein & Pevehouse, International Relations, 2014). Pada penelitian ini akan menggunakan level analisis pada tingkat domestik. Tingkat analisis domestik politik berfokus pada faktor yang berkaitan dengan pengaruh yang diberikan individu di dalam negara, seperti kelompok kepentingan, organisasi politik, dan lembaga-lembaga pemerintah (Goldstein & Pevehouse,

International Relations, 2014). Terkadang negara demokratis negara demokrasi dan kediktatoran dapat bertindak berbeda karena adanya politik konflik etnis dan nasionalisme di dalam negara sehingga mempengaruhi hubungan antar negara (Goldstein & Pevehouse, International Relations, 2014). Analisis menggunakan level domestik politik dapat memberikan jawaban pentingnya lembaga-lembaga dalam negeri berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya tekanan politik domestik dan lingkungan internasional, sehingga kebijakan luar negeri jika tidak dapat diterima dalam lingkup domestik politik maka kemungkinan tidak dapat berhasil dalam lingkup internasional. Dalam politik domestik, tuntutan dan aspirasi merupakan pertimbangan politik luar negeri. Politik domestik dapat digambarkan sebagai kompetisi kepentingan dari institusi pemerintah. Terkait dengan mempertahankan kekuasaan politik, disesuaikan dengan meminimalisis resiko domestik. Dengan berupaya untuk mempertahankan, menghadapi oposisi domestik untuk mendapatkan legitimasi domestik maupun internasional (Masithoh, 2018). Pada tingkat analisis ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi politik domestik yaitu:

1.4.2.1 Birokrasi

Pengaruh dari aktor sub negara, terutama birokrasi (Goldstein & Pevehouse, International Relations, 2014). Dalam pembentukan kebijakan luar negeri negara, birokrasi berfungsi untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Setiap negara memiliki badan birokrasi masing masing termasuk diplomat yang bertugas untuk memfasilitasi dan menjalankan kebijakan luar negeri,

menganalisis informasi, menjalankan perintah, dan memelihara hubungan internasional. Birokrasi di tingkat pemerintahan maupun di dalam lembaga-lembaga cenderung mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kekuasaan dan efektivitas mereka sendiri. Model tawar-menawar pemerintah sering digunakan untuk menggambarkan konflik kepentingan di dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014).

1.4.2.2 Kelompok Kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui upaya lobi, kampanye, dan advokasi. Bahkan dalam kediktatoran, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan masih bisa terjadi, meskipun tidak selalu terlihat secara terbuka. Kelompok kepentingan memiliki kepentingan yang sama dalam isu-isu politik dan hal ini dapat menjadi lebih kuat jika datang dari kelompok etnis yang beragam dalam suatu negara. Lobi yang dilakukan memiliki tiga aspek penting yaitu kemampuan untuk mendapatkan suara dengan pejabat, kemampuan untuk menyajikan argumen yang kuat, dan kemampuan untuk menukar bantuan sebagai imbalan atas dukungan terhadap suatu isu. Bantuan yang dimaksudkan dapat berupa sumbangan kampanye hingga hal-hal ilegal seperti suap, yang memungkinkan menjadi masalah dalam pengambilan keputusan pemerintah di beberapa negara (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014).

1.4.2.3 The Military-Industrial Complex

Military-Industrial Complex (MIC) merupakan suatu jaringan besar yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan industri, dan lembaga penelitian yang bekerjasama untuk menyediakan keperluan militer suatu negara seperti logistik, pengembangan senjata dan lain sebagainya (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014). MIC melibatkan peran dari pihak pemerintah, perusahaan industri, pejabat militer, universitas, dan lembaga penelitian. Perusahaan industri militer sebagai pihak yang memproduksi alat militer akan mendapat keuntungan dari kontrak dengan pemerintah (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014). Lembaga penelitian dan universitas berperan dalam penelitian pengembangan inovasi senjata dan teknologi militer dan akan mendapatkan pendanaan dari kontrak militer. Pemerintah akan mendapat keuntungan membangun karir dalam sistem pertahanan (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014). Dari segi ekonomi politik, dengan adanya pengeluaran militer akan menguntungkan pihak terkait terutama subkontraktor dan pemasok suku cadang seperti menghasilkan pekerjaan dan keuntungan transaksi sektor industri serta mendorong pendanaan penelitian.

Industri militer dapat mempengaruhi opini publik melalui iklan yang mengaitkan dengan produk patriotik dan memberikan sumbangan kampanye kepada politisi yang mendukung anggaran militer (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014). Hal ini menciptakan dinamika kuat dalam konteks global, politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri negara-negara adidaya di balik peningkatan kerjasama dan program pengembangan senjata. Pengaruh politik elit

politik dalam MIC memiliki pengaruh kuat pada kebijakan luar negeri dan pengembangan kekuatan militer seperti yang terjadi pada Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014). Sering kali MIC bertentangan dengan keinginan warga negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa MIC memiliki pengaruh yang tidak beralasan dalam masyarakat dan dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dengan militerisasi yang dilakukan (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014).

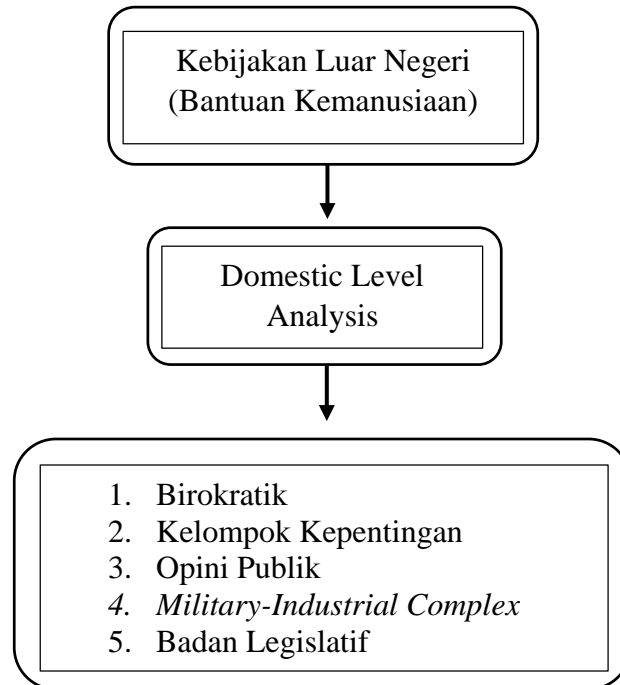
1.4.2.4 Opini Publik

Opini publik berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Aktor domestik terutama pada negara demokratis akan berusaha dalam mempengaruhi opini publik terkait isu-isu penting. Opini publik dapat memaksa pemimpin untuk mengambil tindakan maupun turun dari jabatannya jika kebijakan luar negeri tidak dapat memuaskan hati publik. Kebijakan yang mendapat banyak dukungan dari publik akan sangat memungkinkan untuk mengamankan mandat pemerintah dan keberlanjutan implementasi kebijakan. Di sisi lain opini publik juga mampu untuk membatasi tindakan dan kebijakan luar negeri. Opini publik tidak selalu satu suara, terkadang pandangan dari masyarakat berbeda tergantung dengan aspek dan faktor yang lain seperti wilayah, jenis kelamin, kelompok pendapatan, dan ras. Meskipun opini publik penting, tetapi para pemimpin kebijakan luar negeri juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang yang lain seperti birokrasi dan kelompok kepentingan, yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014).

1.4.2.5 Badan Legislatif

Badan legislatif memiliki peran penting dalam pengaruh terhadap kebijakan, terutama dalam konteks sistem politik yang berbeda. Dalam negara demokrasi presidensial badan legislatif dipilih secara terpisah dari eksekutif (presiden) dan memiliki peran langsung dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam mengesahkan anggaran, mengatur aturan birokrasi, menciptakan hukum perdagangan, dan mengendalikan kebijakan imigrasi. Meskipun eksekutif dapat menghadiri pertemuan dan pembicaraan luar negeri, perjanjian apa pun yang mereka tanda tangani harus disetujui oleh badan legislatif dalam negeri mereka. Dalam sistem parlementer, seperti yang ada di Inggris, eksekutif seperti perdana menteri tidak perlu mengajukan perjanjian atau kebijakan secara terpisah kepada badan legislatif, tetapi badan legislatif tetap memiliki kekuasaan terutama dalam hal persetujuan perubahan hukum yang diperlukan oleh perjanjian internasional. Badan legislatif juga dapat mengadakan pemilihan umum jika suatu kebijakan sangat kontroversial, yang dapat mengakibatkan pergantian eksekutif (Goldstein & Pevehouse, *International Relations*, 2014).

1.5 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan bagan di atas, bantuan kemanusiaan Inggris dianalisis menggunakan Konsep bantuan luar negeri sebagai alat kebijakan luar negeri dan Teori Domestic Level Analysis yang dikemukakan oleh Goldstein. Teori tersebut fokus melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kemanusiaan Inggris terhadap Ukraina dengan menganalisis beberapa pihak politik domestik. Pertama, birokrasi memiliki peran mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri suatu negara, yang biasanya melibatkan diplomat sebagai perwakilan secara resmi dari suatu negara untuk negara lain dan organisasi internasional untuk menjaga hubungan dan memberikan informasi dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, kelompok kepentingan dan partai memiliki kekuatan mendorong pembuat kebijakan luar negeri untuk menimbang isu-isu yang terjadi melalui berkampanye politik, lobbying, demonstrasi hingga melakukan pemogokan dan kekerasan ekstrim.

Ketiga, MIC menggambarkan hubungan antara aspek industri, militer dan pemerintah yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri dalam hal intervensi militer, kerjasama meningkatkan dan menjaga anggaran militer dan kebijakan keamanan. Keempat, opini publik berdampak besar pada kebijakan luar negeri terutama dalam peristiwa konflik dan perang. Kelima, badan legislatif yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan regulasi dalam membentuk, mengawasi dan membatasi kebijakan luar negeri. Maka demikian analisis yang dilakukan pada kelima aspek akan dapat ditarik kesimpulan terkait faktor yang mempengaruhi Inggris dalam implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022.

1.6 Argumen Utama

Politik domestik Inggris mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022 melalui beberapa faktor pendekatan. Dalam konteks politik domestik terdapat beberapa pihak yang berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri Inggris yaitu birokratik, kelompok kepentingan dan partai, opini publik serta badan legislatif. Pertama dengan melakukan pendekatan politis dan aksi- aksi dukungan dari pihak birokratik seperti perdana menteri, diplomat Inggris, pemerintah daerah dan *Foreign Commonwealth & Development Office*. Kedua, *House of Commons* dan *House of Lords* sebagai pihak legislative. Ketiga, dari pihak MIC seperti menteri pertahanan yang bekerja sama dengan organisasi industri pertahanan seperti *Airbus*, *Babcock*, *BAE Systems*, *Leonardo*, *Lockheed Martin*, *MBDA*, *Northrop Grumman* dan lain sebagainya. Mereka mempengaruhi pengambil

kebijakan untuk mendukung penuh atas tindakan tersebut sebagai bentuk mempertahankan ideologi dan wilayah negara Ukraina. Hal ini sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara Inggris sebagai negara demokratik.

Keempat, kelompok kepentingan termasuk komunitas besar di Inggris seperti *Disasters Emergency Committee*, *Campaign Against Arms Trade* serta partai politik memberikan dukungan atas bantuan kemanusiaan dengan melakukan penggalan dana dan *volunteer*. Kelima, melalui pendekatan opini publik dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas sehingga meningkatkan dukungan publik atas keberpihakan terhadap Ukraina di Inggris. Secara keseluruhan publik di Inggris berdiri dari sisi kemanusiaan dengan mendukung pemerintah untuk menghentikan perang, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan ini mampu menghasilkan berupa data deskriptif yang didapat baik secara lisan atau tulisan dari objek penelitian yang menjadi fokus utama (Lexy, 2007). Menurut Ramdhan, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi sebuah fenomena yang diteliti sesuai dengan fakta (Ramdhan, 2021). Penelitian deskriptif cenderung eksploratif

yang dapat memberikan gambaran detail sebuah peristiwa yang memiliki korelasi terhadap dua variabel atau lebih (Ramdhan, 2021).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan dua cara yaitu studi literatur dan dokumentasi. Yang pertama, teknik studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka untuk membantu dalam menyusun landasan teori, merumuskan kerangka berpikir dan argumen utama. Keuntungan dari metode pengumpulan data studi literatur adalah fleksibel yang memungkinkan untuk mengakses beragam informasi tanpa terbatas oleh waktu dan tempat (Kurniawati, 2021). Pengumpulan data dapat diperoleh dari beberapa portal berita dan laporan dari situs website terkait dengan dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap Inggris, respon Inggris terkait perang Ukraina dan Rusia, bentuk kontribusi serta kebijakan luar negeri Inggris kepada Ukraina.

Contoh sumber informasi yang digunakan yaitu Liputan 6, CNBC, CNN, *Institute For Government UK*, *UK Parliamen*, *UN Women* dan lain sebagainya. Selain itu, referensi dapat bersumber dari jurnal, skripsi, thesis, artikel dan lain sebagainya. Kedua, teknik dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen publik maupun pribadi dalam penelitian berupa teks dan narasi tetapi berupa foto serta grafik yang valid dan relevan terhadap topik penelitian yang dikupas (Kurniawati, 2021).

1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah yang pertama dengan cara pengumpulan data terlebih dahulu melalui studi literatur dan dokumentasi dari sumber terpercaya dan terperinci (Rezkie, 2020). Selanjutnya data akan dianalisis dengan pengklasifikasian data untuk memilah data dan poin penting yang sesuai dengan topik penelitian (Rezkie, 2020). Data akan disajikan dengan bentuk bagan, flowchart, teks maupun narasi dengan tujuan agar peneliti dapat memahami yang terjadi serta dapat menentukan tindakan selanjutnya (Rezkie, 2020). Selanjutnya data yang disajikan sesuai dengan topik penelitian akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan akan disesuaikan pada teori serta tujuan penelitian. Sehingga hasil yang didapatkan jelas, valid dan relevan.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian terdapat pada pembahasan faktor yang mempengaruhi negara Inggris memberlakukan kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina. Jangkauan waktu penelitian yang diambil adalah periode tahun 2022, dimana pada tanggal 24 Februari 2022 adanya invasi Rusia dan menjadi titik awal pergerakan politik domestik Inggris hingga bulan Desember 2022.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Pada BAB I terdapat penulisan bagian Pendahuluan berisi beberapa aspek penelitian yaitu Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Argumen Utama dan Metode Penelitian. Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian,

Jangkauan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penelitian.

- Pada BAB II merupakan bagian yang membahas faktor domestik dari segi birokratik, badan legislatif dan MIC terkait kebijakan bantuan kemanusiaan Inggris terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022.
- Pada BAB III pembahasan terkait faktor domestik dari kelompok kepentingan, partai dan opini publik yang mempengaruhi serta analisis proses implementasi kebijakan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina pada masa invasi Rusia tahun 2022.
- Pada BAB IV bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dengan paparan penutup dan saran terkait dengan kemungkinan penelitian lanjutan.

Bagian Akhir dapat disertakan yang meliputi daftar pustaka lengkap dan relevan yang digunakan dan lampiran-lampiran berupa gambar, grafik atau temuan yang mendukung penelitian.